



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAKIP TAHUN 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala limpahan berkat-NYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya.

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam arti luas LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019. Mudah-mudahan, penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya tahun 2019.

Wamena, 20 Januari 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
DAN PENATAAN RUANG
MARCUS ADOLF HATTU, ST
NIP. 1960844 198103 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	iii
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
D. ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH	4
D.1. Isu-isu Strategis Terkait Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	10
E. DASAR HUKUM	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
A.1 Visi, Misi	14
A.2 Tujuan, Sasaran	14
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	42
LAMPIRAN :	
I Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD 2018-2023	
II Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2019	
III Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2020	
IV Formilir Pengukuran Kinerja Eselon II, III, dan IV	
V SOP Pengumpulan Data	
VI Rencana Aksi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2019 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai sasaran strategis DPUPR, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya. Pada tahun 2019 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 62,39 milyar untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penatan ruang. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas PUPR untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun Anggaran 2019;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

• TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya mempunyai :

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

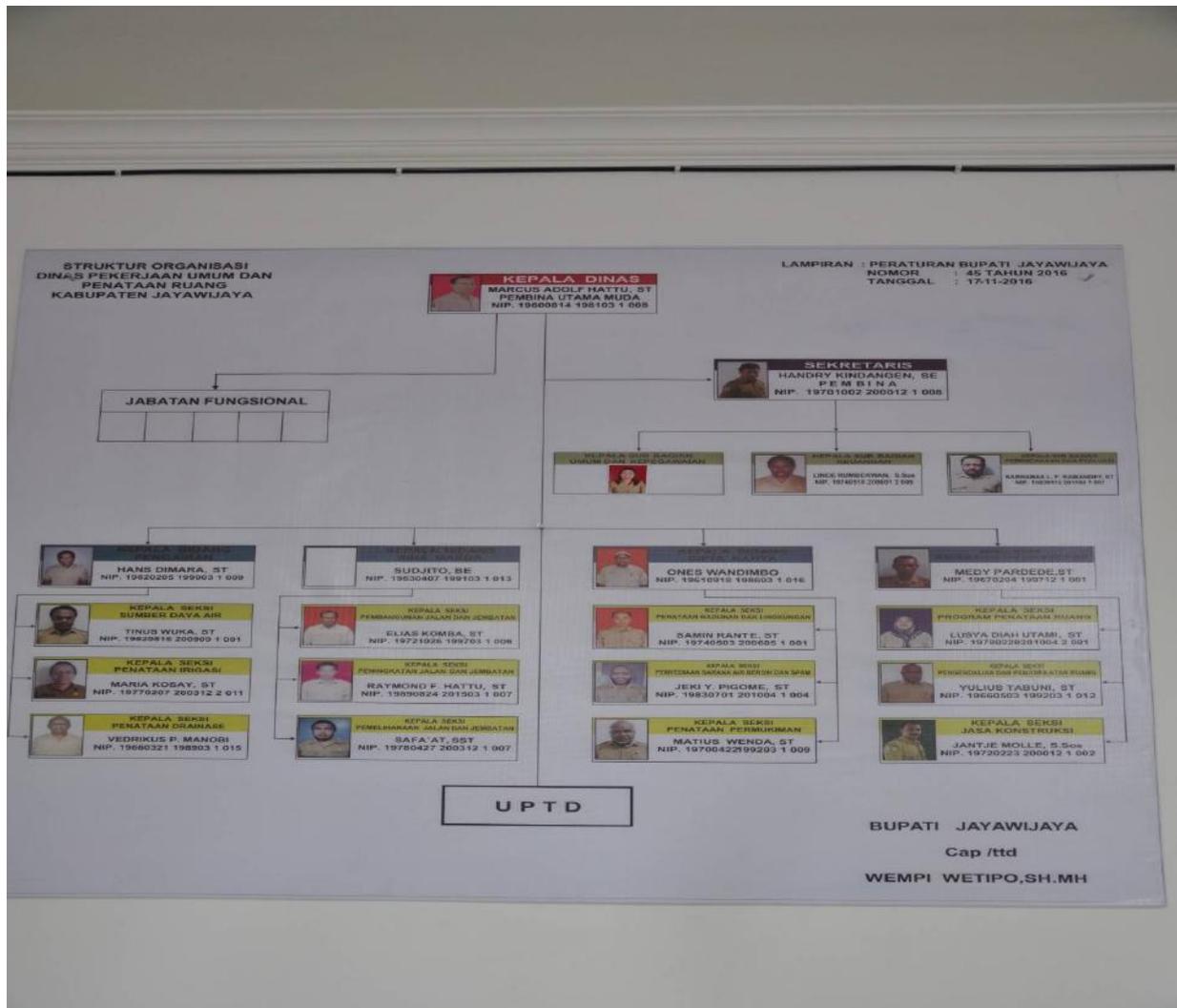
- **STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan unsure pelaksana urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan / Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Program Penataan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Jasa Konstruksi
4. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - b. Seksi Penyediaan Sarana Air Bersih dan SPAM
 - c. Seksi Penataan Permukiman
5. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Bidang Pengairan, membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya Air
 - b. Seksi Penataan Irigasi
 - c. Seksi Penataan Drainase

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA



D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta, irigasi, penataan lingkungan dan sanitasi serta penataan ruang. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, antara lain, mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas dan peningkatan infrastruktur gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas PUPR berusaha keras untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan di

Kabupaten Jayawijaya, salah satunya yaitu dengan memprioritaskan peningkatan jaringan irigasi melalui peningkatan daerah irigasi. dengan pembangunan irigasi diharapkan produksi pangan akan semakin baik. Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas PUPR untuk meningkatkan konektivitas di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah maupun roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan konektivitas, harga barang diseluruh wilayah kabupaten Jayawijaya relatif sama, serta wilayah yang relatif tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Isu strategis adalah pertanyaan yang luas menyangkut kebijakan atau tantangan kritis yang akan mempengaruhi mandate, misi, nilai-nilai yang dianut, atau sasaran layanan. Isu strategis ini dapat melibatkan konflik antara satu hal dengan hal lainnya. Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka isu strategis adalah pilihan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya tersebut.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimasa datang. Satu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, serta analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimasa lima tahun yang akan datang.

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyediaan air baku mempertimbangkan hasil telaahan terhadap dinamika global dan nasional, diantaranya :

a) Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyediaan Air Baku.

1. Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten

Kinerja jaringan irigasi berdasarkan kewenangannya sampai saat ini merupakan kinerja kurang dan perlu perhatian karena banyak factor yang belum atau tidak dicapai seperti :

- a. Prasarana fisik (bangunan utama, saluran, bangunan pendukung, dan jalan inspeksi)
- b. Produktifitas tanam (kebutuhan air, realisasi tanam);
- c. Sasaran penunjang (alat-alat, OP, tranportasi, alat kantor, alat komunikasi);

- d. Organisasi (organisasi OP dan personil);
- e. Database (data Daerah irigasi, peta dan gambar);
- f. P3A (status, kondisi, koordinasi, partisipasi).

Kesemuanya merupakan kesaatuan utuh dalam pengelolaan irigasi, untuk itu perlu dilakukan penanganan pengelolaan irigasi dengan koordinasi dengan menfungsikan komisi irigasi kabupaten dan peningkatan kemandirian masyarakat P3A untuk mewujudkan pelayanan air irigasi untuk pertanian rakyat dengan kondisi debit andalan mencapai 70 %.

2. *Penataan Sungai di wilayah Perkotaan*

Dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan dan daya rusak air, perlu dilakukan penanganan khusus untuk sungai-sungai yang melintasi perkotaan, partisipasi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sungai-sungai diperlukan.

3. *Peningkatan Pemanfaatan Air Baku Permukaan untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Kehidupan Masyarakat Sehari-hari.*

Dengan memanfaatkan sungai, mata air maka diharapkan kawasan-kawasan pembangunan di wilayah yang sulit dapat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, kebutuhan pokok masyarakat perlahan diantisipasi dengan pemenuhan kebutuhan berdasar teknologi tepat guna dan sasaran.

4. *Pemuktahiran dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air*

Sebagai basis data dalam pembangunan maka pengelolaan data merupakan subjek terpenting. Pola pengelolaan dan kajian pengaturan dalam bentuk PERDA perlu didorong sehingga ada kejelasan hukum dan tidak terjadi ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Jayawijaya.

b) *Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan Jalan*

1. *Masih Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan*

Dukungan ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat Jayawijaya masih jauh dari memadai dan masih terus menerus perlu ditingkatkan dan dipertahankan ketersediannya. Sampai saat ini ketersediaan infrastruktur jalan kabupaten dalam keadaan baik dan sedang untuk mendukung kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, masih dirasakan sangat kurang oleh masyarakat terutama yang berada di kampung-kampung. Pada saat ini dari 358,60 Km panjang jalan kabupaten, kondisi jalan dalam keadaan mantap (baik/sedang) pada tahun 2018 = 344,29 %

2. *Sebagian Besar Jaringan jalan di Wilayah Tengah berada pada Daerah Rawan Banjir.*

Wilayah Jayawijaya bagian Tengah merupakan daerah yang rawan bencana banjir akibat luapan air sungai Baliem. Banyak diantara jalan-jalan wilayah Jayawijaya bagian Tengah yang mengalami kerusakan bukan diakibatkan karena beban lalu lintas kendaraan, melainkan akibat terendahnya badan jalan sehingga merusak sebagian badan jalan .

3. *Sebagian Ruas Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Pelayanannya*

Habisnya umur pelayanan jalan ditandai dengan rusaknya kondisi struktur jalan, penyebab dari kerusakan ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya : akibat kelebihan beban kendaraan, akibat air, erosi, bencana alam, dan lain-lain.

4. *Kerusakan Jalan Akibat Muatan Melebihi Kapasitas Daya Dukung Jalan*

Umumnya ruas-ruas jalan kabupaten terutama yang berada di luar kota, kapasitas daya dukung jalan belum memenuhi standar muatan sumbu terberat (MST) 8 ton sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Hal tersebut dikarenakan umumnya jalan-jalan di kabupaten yang sudah terbangun kapasitas daya dukung muatan sumbu terberatnya masih di bawah 8 ton. Sehingga jalan-jalan yang merupakan akses ke daerah pemekaran dan lokasi sumber quarry (galian c) pada umumnya mengalami kerusakan yang lebih dini dibandingkan ruas jalan lainnya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan truck-truck pengangkut kayu yang berasal dari daerah pemekaran maupun truck-truck pengangkut material pasir, batu dari daerah quarry muatannya melebihi kemampuan daya dukung jalan kabupaten tersebut, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat meningkatkan kapasitas daya dukung jalan-jalan luar kota tersebut, khususnya akses ke daerah pemekaran dikarenakan terbatasnya anggaran.

5. *Penggunaan Ruang Manfaat Jalan Yang Tidak Sesuai Fungsinya*

Penggunaan ruang manfaat jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya masih saja kerap terjadi pada ruas-ruas jalan kabupaten. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan untuk digunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga menyebabkan terganggunya keamanan dari konstruksi jalan, yang mana pada akhirnya dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat masih sering ditemui adanya masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan tepi jalan, mencuci kendaraan pada bahu jalan yang dapat menyebabkan rusaknya bahu jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan,

pasar tumpah, parkir di daerah terlarang, dan lain-lain, semuanya dapat membahayakan bagi lalu lintas.

6. *Belum Optimalnya Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa*

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi : pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan; pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan desa masih terkendala dengan alokasi anggaran dan tingkat pendidikan aparatur penyelenggara jalan terutama untuk penyelenggara jalan desa. Dengan terbitnya undang-undang No. 4 Thn. 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya PP No.43 Thn. 2014, serta Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Thn. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dimana berdasarkan peraturan dan perundangan tersebut, pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan desa menjadi kewenangan Desa. Sehingga diperlukan bimbingan teknik, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa. Mengingat cukup banyaknya desa di wilayah kabupaten Jayawijaya dan terbatasnya alokasi anggaran, sehingga belum seluruh aparatur desa yang mendapat pembinaan. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan masih belum berkembang karena belum dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, sehingga belum dihasilkannya konstruksi jalan hasil pengembangan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dalam hal pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan ruang jalan masih banyak mengalami kendala, karena belum semua masyarakat faham tentang pemanfaatan ruang jalan oleh masyarakat untuk kepentingan selain dari pada itu kepentingan lalu lintas harus emnadapat izin atau rekomendasi dari Pembina jalan. Sehingga masih banyak terjadi pemanfaatan ruang jalan yang dilakukan oleh masyarakat menyalahi ketentuan peraturan dan perundangan.

7. Pembangunan Infrastruktur Yang Tahan Lama Sesuai Dengan Tujuan SDGs

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada perayaan ulang tahunnya yang ke 70, mengagendakan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan baru yang disebut dengan “*Sustainable Development Goals (SDGs)*” yang dimulai tahun 2016 sampai 2030. Agenda pembangunan berkelanjutan tersebut terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 169 targetnya yang terintegrasi dan tak terpisahkan. Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu *Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.*

Untuk mencapai tujuan SDGs tersebut, maka harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya adalah masih banyaknya hasil pelaksanaan pembangunan jalan yang kualitasnya masih dibawah standar, sehingga umur pelayanan jalan banyak yang tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tingkat penguasaan teknologi pekerjaan jalan oleh para penyedia Jasa pekerjaan jalan yang masih rendah, penggunaan material untuk pekerjaan jalan yang dibawah standar, lemahnya kemampuan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan oleh aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta kondisi wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terjal dan berbukit.

D.1. ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di sekitar kawasan perkotaan yang dapat mengancam ketersediaan pangan;
- b. Masih luasnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan perdesaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan antara daerah perkotaan dan perdesaan;
- c. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor;
- d. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang akibat inkonsistensi dan lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang sehingga banyak ditemui pelanggaran terhadap tata ruang.
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, sehingga tata ruang

- belum menjadi kebutuhan;
- f. Masih lemahnya koordinasi antar para pelaku penataan ruang, sehingga sering timbul kepentingan antar sektor;
 - g. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dibidang tata bangunan dalam upaya pembinaan masyarakatnterkait penyelenggaraan bangunan gedung;
 - h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang terencana, tertata, dan terkendali.

E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan beban Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang

- Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum PD, isu strategis yang berpengaruh, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan mengenai visi, misi, tujuan (upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayawijaya dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analisis, realisasi, rasional dan komprehensif, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program), kebijakan (adalah arah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya). Dan juga menyajikan perjanjian kinerja tahun 2019, terutama menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2019, sesuai dengan anggaran tersedia.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 dan bersifat induktif.

A.1. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah **“ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”**

Perwujudan Misi tersebut melalui lima Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan Perkenomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut telah disusun program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
- 3) Pengembangan Potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Mengingat tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait tanggung jawab misi ke 5, yaitu Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan dan program prioritas ke 3, sehingga diidentifikasi yang akan dilakukan adalah permasalahan dan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk keberhasilan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi, secara kolektif, tujuan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang diidentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

A.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR yang merupakan hasil penyelarasan dari tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018-2023. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

A.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan , maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur.
Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan 3 : Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan pariwisata sesuai dengan potensi daerah, berupa :
 - Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
 - Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang dipelihara;
 - Meningkatnya survey kondisi jalan dan jembatan;
 - Meningkatnya sistem informasi database jalan dan jembatan;
 - Meningkatkan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - Meningkatnya rumah tangga berakses air minum;
 - Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan;
 - Meningkatnya infrastruktur perdesaan;
 - Meningkatnya infrastruktur yang mendukung kepariwisataan;
 - Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat

- tumbuh;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian Dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat, berupa :
- Meningkatnya proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya Pertanian;
 - Meningkatnya saluran/drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik;
 - Meningkatnya penanggulangan banjir pada sungai yang meluap;
 - Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW;
 - Meningkatnya rasio RTH persatuan wilayah ber-PHPL/HGB;
 - Meningkatnya RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah
- c. kota/kawasan kota;
- Meningkatnya kualitas aksesibilitas masyarakat, berupa :
- Meningkatnya rumah tangga bersanitasi.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Hasil Penyelarasan RPJMD Tahun 2018-2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	65,31	65,47	65,50	65,55	65,72	65,87
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	55,00	55,40	56,14	57,28	59,04	60,88
				Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	70,79	71,50	72,40	73,50	74,60	75,00

3.	Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Pengembangan Jasa dan Pariwisata dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan Pariwisata Sesuai dengan Potensi Daerah	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara	71,89	72,80	73,00	74,50	75,40	76,00
				Persentase Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	45,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
				Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	50,00	50,00	50,00	75,00	85,00	100,00
				Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	26,68	27,03	28,44	32,43	37,14	43,88
				Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	30,31	31,80	35,22	37,17	38,52	41,16
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	15,22	15,22	17,44	25,27	30,11	35,00
				Capaian Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	50,58	51,30	53,40	55,20	57,40	59,50
				Persentase Infrastruktur Yang Mendukung Kepariwisataaan	15,00	15,00	15,00	25,00	30,00	35,00
				Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	45,32	46,80	48,20	49,40	51,00	52,80
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	38,87	39,06	40,54	41,39	42,70	43,85
			Persentase Saluran/ Drainase Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik, Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	76,32	77,10	78,40	79,50	80,60	81,70	
			Persentase Penanggulangan Banjir Pada Sungai Yang Meluap	73,38	74,20	75,60	76,40	77,60	78,50	

			Persentase Ketaan Terhadap RTRW	30,00	44,02	45,18	46,30	47,11	48,05
			Rasio RTH Persatuan Wilayah Ber-PHPL/HGB	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	100,00
			Luas RTH Publik sebesar 20 % Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Kota	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	27,44	29,21	31,28	33,45	35,80	37,04

A.2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di bidang infrastruktur. Adapun strategi, kebijakan dan program prioritas pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 disajikan pada tebal 4.3. sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas RPJMD Tahun 2018-2023
Bidang Infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Cap[ai]an Kinerja dan Keuangan	Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Program Pningkatan Kulaitas Sumber Daya Arapatur	Program Pningkatan Kulaitas Sumber Daya Arapatur

Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan pariwisata sesuai dengan potensi daerah	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan pariwisata sesuai dengan potensi daerah	Pengembangan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

A.2.4. Program

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, dapat dirumuskan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Jayawijaya sebanyak 20 Program dan 75 Kegiatan antara lain :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional;
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f) Penyediaan Makan dan Minum Rapat;
- g) Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah;
- h) Survey/Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Dalam Daerah.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek;

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c) Pembangunan Pagar Keliling Kantor PDAM;
 - d) Rehabilitasi Berat Kantor PDAM;
 - e) Pembangunan Pos Keamanan Wouma;
- 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
 - a) Pembangunan Jalan;
 - b) Pembangunan Jembatan;
 - c) Peningkatan Jalan;
- 6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - a) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
 - b) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
- 7) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan**
 - a) Survey Kondisi Jalan dan Jembatan;
- 8) Program Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan**
 - a) Penyusunan Dokumen Informasi Database Jalan dan Jembatan;
- 9) Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong**
 - a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran/Drainase;
 - b) Pembangunan Gorong-gorong;
 - c) Rehabilitasi / Pemeliharaan Gorong-gorong/Trotoar;
- 10) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
 - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Tangkapan Air;
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana IPA;
 - c) Pembangunan Instalasi Pipa dari Intek ke IPA;
- 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
 - a) Pembangunan Sarpras Air Minum/Air Bersih;
 - b) Peningkatan Sarpras Air Minum / Air Bersih;
 - c) Rehabilitasi Sarpras Air Minum / Air Limbah;
 - d) Pembangunan Sarpras Sanitasi/IPAL Komunal Kombinasi MCK;
 - e) Pembangunan Jaringan Pembuangan Air Kotor/Air Limbah;

12) Program Pembangunan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- a) Pembangunan Jaringan Irigasi;
- b) Peningkatan Jaringan Irigasi;
- c) Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- d) Penyusunan DED 11 Daerah Irigasi;
- e) Normalisasi Sungai;

13) Program Pengendalian Banjir

- a) Pembangunan Bangunan Pengaman Banjir (Talud, Turap, Bronjong, Sheet Pile);

14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- a) Pembangunan Gedung Laboratorium Konstruksi;
- b) Pengadaan Peralatan Laboratorium;

15) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- a) Pembangunan Taman Wio Silimo;

16) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- a) Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan;
- b) Peningkatan jalan Lingkungan Perdesaan;
- c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perdesaan;
- d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;
- e) Rehab/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;

17) Program Pembangunan Infrastruktur Keparawisataan

- a) Pembangunan Jaringan Air Bersih Kawasan Wisata FBLB Walesi;
- b) Pembangunan Jaringan Air Bersih Kawasan Wisata Mumi Pumo;
- c) Pembangunan Jaringan Air Minum Kawasan Wisata Mumi Alowuka Hubi;
- d) Pembangunan Jaringan Air Minum Kawasan Wisata Mumi Weropak Elosak;
- e) Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Wisata Yali Mabel;
- f) Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Wisata Suroba Pisughi;
- g) Pembangunan Jaringan Air Bersih Kawasan Wisata Goa Sikepalkifika Usilimo;
- h) Pembangunan Sarpras Sanitasi Kawasan Wisata FBLB Walesi;
- i) Pembangunan Sarpras Sanitasi Kawasan Wisata Mumi Alowuka Hubi;
- j) Pembangunan Sarpras Sanitasi Kawasan Wisata Mumi Weropak Elosak;
- k) Pembangunan Sarpras Sanitasi Kampung Wisata Yali Mabel;

- l) Pembangunan Sarpras Sanitasi Kampung Wisata Suroba Pisughi;
- m) Pembangunan Sarpras Sanitasi Kampung Wisata Lodama Jiwika;
- n) Pembangunan Jalan Masuk Lokasi Kampung Wisata Weropak Elosak;
- o) Pembangunan Jalan Masuk Lokasi Kampung Wisata Yali Mabel Kurulu;
- p) Pembangunan Jalan Masuk Lokasi Kampung Wisata Suroba Pisughi;
- q) Pembangunan Jalan Masuk Lokasi Kampung Wisata Goa Sikepalikifika Usilimo;

18) Program Perencanaan Tata Ruang

- a) Review RTRW;
- b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

19) Program Pemanfaatan Ruang

- a) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- b) Penyusunan Norma, Standard an Kriteria Pemanfaatan Ruang;
- c) Sosialisasi Kebijakan, Norma Standard an Manual Pemanfaatn Ruang;

20) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b) Penyusunan Prosedur Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 mencakup 4 sasaran strategis yang didukung oleh 20 sasaran Program. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Jayawijaya dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, dari perjanjian kinerja tersebut memuat penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya mencakup sasaran strategis, indikator sasaran, target dan program serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR.

Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam perjanjian kinerja Dinas PUPR tahun 2019 sebagaimana tertera pada :

Tabel 2.6. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan pariwisata sesuai dengan potensi daerah	1.1	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	71,50
		1.2	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)	31,80
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Masyarakat	2.1	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian (%)	39,06
3.	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Masyarakat	3.1	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	29,21

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.383.800,00	DAU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.984.000.000,00	DAU
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.820.000,00	DAU
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32.419.900.500,00	DAU, DAK
5	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.995.805.000,00	DAU
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.160.047.782,00	DAK, DAU
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jaringan Air Minum dan Air Limbah	10.688.365.797,12	DAK, DAU
JUMLAH ANGGARAN		61.151.322.879,12	--

Secara rinci Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dapat dilihat pada lampiran II Laporan Kinerja (LKj) ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi. LKjIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrument dan metode pertanggung jawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sistem tersebut membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, maka Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggung jawaban kinerja dari perjanjian kinerja tahun 2019 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

- (1) **Data Internal**, yang berasal dari sistem informasi yang ada berupa laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- (2) **Data Eksternal**, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya yang berupa laporan dari Badan dan Dinas lain yang terkait.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Untuk Tahun 2019 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/jasa dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan orang, paket, buah, unit, m³ dan m², rupiah, dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang berkaitan dengan kegiatan Tahun 2019 tidak dilakukan pengukuran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Komponen proses ini diukur sejak dari goals Dinas PUPR (dampak/impact) sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis (Renstra) Dinas PUPR yang merupakan cerminan kondisi dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact) pada level customer yang dilayani yaitu meningkatnya keandalan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar, dan keseimbangan pembangunan antar daerah, sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang harus dipenuhi) merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sasaran Strategis 2 (SS2) - Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
3. Sasaran Strategis 3 (SS3) - Meningkatnya rumah tangga berakses air minum.
4. Sasaran Strategis 4 (SS4) - Meningkatnya rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya Pertanian.
- Sasaran Strategis 5 (SS5) - Meningkatnya rumah tangga bersanitasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 yang mengacu pada pencapaian misi Kabupaten (misi.5) dapat disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah “

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Capaian Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	85,76	85,76	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat :

“ Capaian Administrasi Perkantoran “

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) : “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” melalui indikator kinerja Capaian Administrasi Perkantoran dengan realisasi 100,00 % dari target 100,00 % sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut *memuaskan* dengan nilai capaian 100,00 %.
2. Sasaran Strategis 1 (SS1) : “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”, melalui indikator kinerja “ Capaian Administrasi Perkantoran” dengan realisasi 85,76 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) sebesar 100,00 % maka mengalami penurunan, dapat dilihat pada tabel grafik berikut ini :

Tabel 3.3. Tabel Grafik (SS1)



Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 2.1 : “ Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik”

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik, merupakan hasil persentase variable pengukuran :

- Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik.
- Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara
- Persentase Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan

Tabel 3.4.
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	70,79	71,50	71,60	100,13	75,00
2.	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara	71,89	72,80	72,97	100,23	76,00
3.	Persentase Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	45,00	60,00	60,00	100,00	100,00

Dari Tabel di atas dapat dilihat :

“ Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik “

1 Sasaran Strategis (SS2.1) : “ Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik “, melalui Indikator Kinerja : Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dengan realisasi 71,60 % dari target 71,50 % sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian Kinerja Indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian kinerja 100,13 % Indikator sasaran kinerja (SS2.1) “ Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik “ ini merupakan Indikator Utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

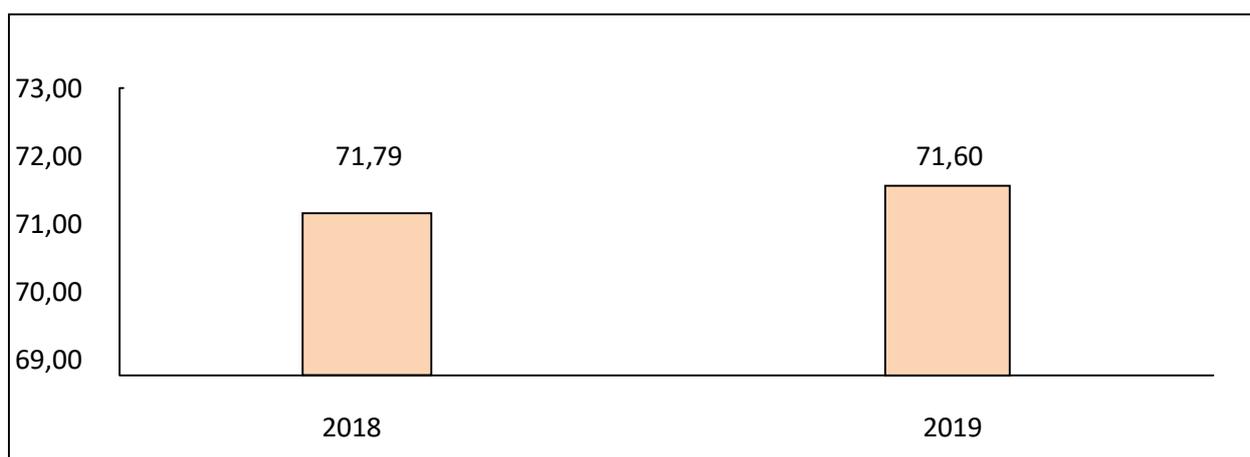
$$\text{Indikator SS2.1 : Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik} = \frac{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)}}{\sum \text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100,00 \%$$

Tabel 3.5.
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS. 2.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Km)	Realisasi (Km)	Capaian Realisasi (%)
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan Yang Dibangun	273,08	275,40	71,60
	Total panjang Jalan Kabupaten	384,63	384,63	

- 2 Sasaran Strategis (SS2) : " Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik ", melalui indikator kinerja : Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dengan realisasi 71,60 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) sebesar 70,79 % maka mengalami kenaikan sebesar 0,81 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS2.1)



- 3 Tercapainya indikator sasaran " Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik" dengan kategori sangat memuaskan dikarenakan didukung dari beberapa kegiatan pembangunan dan peningkatan Jalan sampai tahun 2019 sepanjang 275,40 Km dengan beberapa sumber dana diantaranya APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran “ Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik” dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.6.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SS.2.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	100,13	96,95	3,10

5. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.2) Meningkatkan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, melalui indikator kinerja “ Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik “ sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan keluaran (output) tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan sebanyak 8 (delapan) dokumen atau mencapai 100,00 %, dengan realisasi anggaran Rp. 955.000.000,00 atau 99,52 % dari anggaran Rp. 959.591.000,00
 - 2) Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan keluaran (output) tersedianya dokumen pengawasan teknis jalan dan jembatan sebanyak 8 (delapan) dokumen atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 755.559.000,00 atau 99,72 % dari anggaran Rp. 757.659.500,00
 - 3) Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), dengan keluaran (output) panjang Jalan Kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 3,38 Km atau mencapai 100,00 %, dengan realisasi anggaran Rp. 30.057.471.000,00 atau 96,75 % dari anggaran Rp. 31.066.176.000,00

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS.2.2) : “ Meningkatkan Jalan Kabupaten Yang Dipelihara “

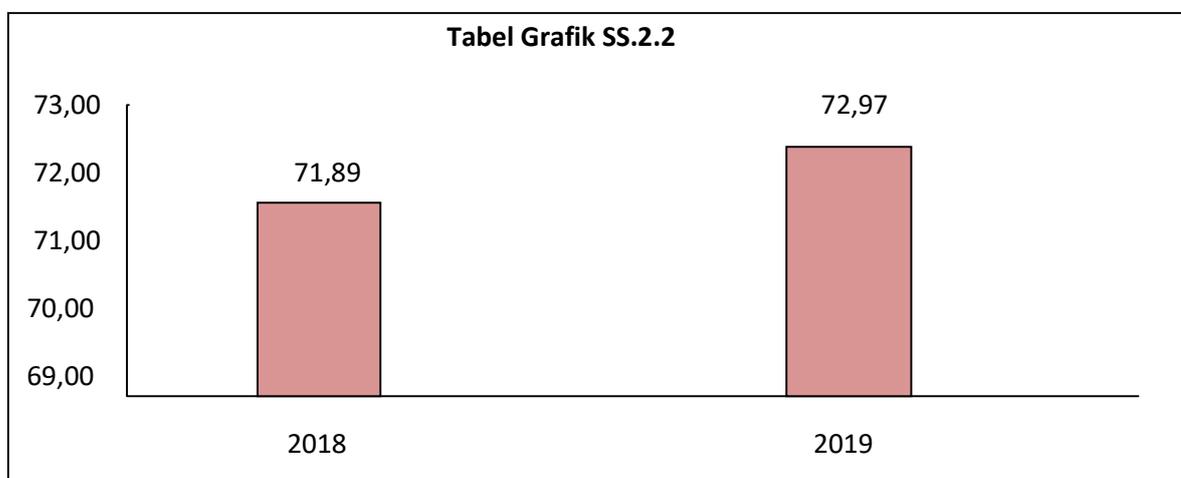
1. Sasaran Strategis (SS.2.2) : “ Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Yang Dipelihara “ melalui indikator kinerja : “ Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Yang Dipelihara “ dengan realisasi 72,97 % dari target 72,80 %. Capaian Kinerja Indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian kinerja 100,23 %.
- Indikator sasaran kinerja (SS2.2) “ Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Yang Dipelihara “ dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indikator SS2.2} : \frac{\Sigma \text{ Panjang Jalan Kabupaten Yang Dipelihara}}{\Sigma \text{ Panjang Seluruh Jalan Kabupaten}} \times 100,00 \%$$

Tabel 3.7.
Pengukuran Indikator (SS.2.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Km)	Realisasi (Km)	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten Yang dipelihara Kondisinya.	Panjang Yang Dipelihara Kondisinya	280,01	280,66	72,97
	Total Panjang Jalan Kabupaten	384,63	384,63	

2. Sasaran Strategis SS2.2 : “ Meningkatkan panjang Jalan kabupaten yang dipelihara kondisinya, melalui indikator kinerja Persentase Panjang Jalan Kabupaten Yang Dipelihara dengan realisasi 72,97 % dari target 72,80 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) sebesar 71,89 % maka mengalami kenaikan sebesar 1,08 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Tercapainya Indikator “ Persentase Panjang Jalan Kabupaten Yang Dipelihara Kondisinya “ dengan kategori **sangat memuaskan** dikarenakan didukung dari beberapa kegiatan dengan panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara dan dijaga kondisinya sampai tahun 2019 sepanjang 280,66 Km.
4. Untuk mencapai Sasaran Strategisw (SS2.2) : “ Meningkatkan Panjang Jalan Kabupaten Yang Dipelihara Kondisinya”, melalui indikator kinerja : “ Presentase Panjang Jalan Kabupaten Yang Dipelihara Kondisinya, didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota sebanyak 1 (satu) dokumen atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 70.265.000,00 atau 97,50 % dari anggaran Rp. 72.060.000,00
- 2) Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota sebanyak 1 (satu) dokumen atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 135.540.000,00 atau 100,00 % dari anggaran Rp. 135.540.000,00
- 3) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota sepanjang 3,00 Km atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 2.790.000.000,00 atau 99,10% dari anggaran Rp. 2.792.760.000,00

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS.2.3) : “ Meningkatkan Pelaksanaan Inspeksi/Survey Kondisi Jalan Kabupaten “.

1. Sasaran Strategis (SS.2.3) : “ Meningkatkan Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten , melalui indikator kinerja : “ Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Yang Di survey Kondisinya “ dengan realisasi 60,00 % dari target 60,00 %. Capaian Kinerja Indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian kinerja 100,00 %.

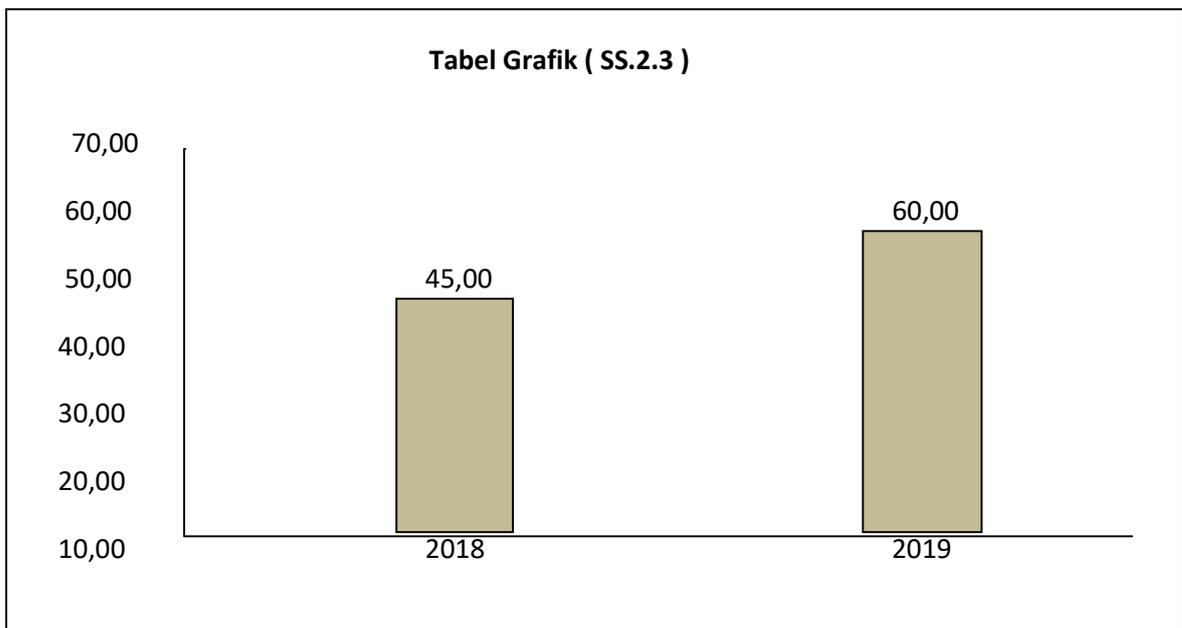
Indikator Sasaran Kinerja (SS.2.3) : “ Meningkatkan/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten “ , dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator S2.3	:	Persentase Inspeksi/Survey Kondisi Jalan Kabupaten	=	$\frac{\Sigma \text{ Panjang Jalan Kabupaten Yang Disurvey Kondisinya}}{\Sigma \text{ Panjang Seluruh Jalan Kabupaten}} \times 100,00\%$	
----------------	---	---	---	--	--

Tabel 3.8.
Aanalisis Pengukuran Indikator Sasaran Strategis (SS.2.3)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Km)	Realisasi (Km)	Capaian realisasi (%)
Meningkatnya Pelaksanaan Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten Yang Di survey Kondisinya	230,78	230,78	60,00 %
	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	384,63	384,63	

2. Sasaran strategis (SS.2.3) : “ Meningkatkan Pelaksanaan Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan “, melalui Indikator kinerja : “ Persentase Inspeksi Panjang Jalan dan Jembatan dengan realisasi 60,00 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) sebesar 45,00 %, maka mengalami kenaikan sebesar 15,00 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Tercapainya indikator “ Persentase Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan “ dengan kategori **sangat memuaskan** dikarenakan tercapainya target dokumen yang dihasilkan :
- 1) Dokumen Data Base Jalan (DD1)
 - 2) Dokumen Data Base Jembatan (DD2)
 - 2) Dokumen Peta Jaringan Jalan dan Jembatan

4. Sasaran Strategis (SS.2.3) : “ Meningkatnya pelaksanaan Inspeksi/Survey Kondisi jalan dan jembatan, melalui indikator : “ Persentase Survey Kondisi Jalan dan Jembatan “ didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Survey Kondisi Jalan dan Jembatan , dengan keluaran (output) tersedianya dokumen bahan kebijakan program bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 3 (tiga) dokumen atau mencapai 100,00 %, dengan realisasi anggaran Rp. 556.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran Rp. 556.000.000,00

Evaluasi Sasaran Strategis (SS.3) : “ Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum “

Tabel 3.9.

Aanalisis Kinerja Sasaran Strategis 3. (SS.3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum	30,31	31,80	32,02	100,69	41,16

Dari tabel di atas dapat dilihat :

“ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum :

1. Sasaran Strategis (SS.3) : “ Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum “, melalui indikator kinerja : “ Persentase Rumah Berakses Air Minum “ dengan realisasi 32,02 % sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja . Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian kinerja 100,69 %.

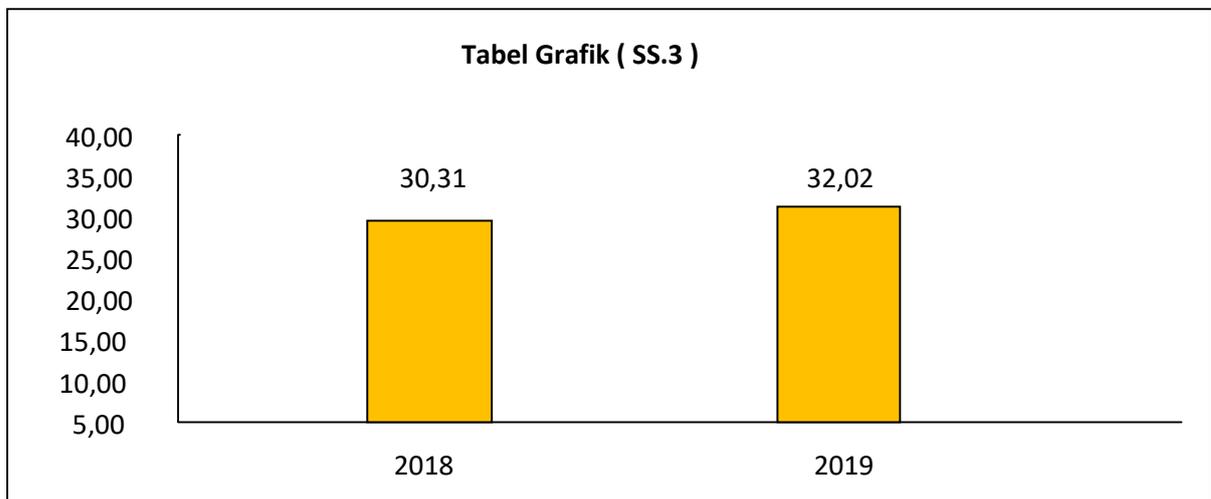
Indikator sasaran kinerja (SS.3) : “ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum “ ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indikator (SS.3)} : \text{Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum} = \frac{\Sigma \text{Rumah Tangga Berakses Air Minum}}{\Sigma \text{Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100,00 \%$$

Tabel 3.10.
Pengukuran Indikator Sasaran Strategis (SS.3)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (RT)	Realisasi (RT)	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum	Σ Rumah Tangga Berakses Air Minum	18.798,00	18.928,00	32,02
	Σ Rumah Tangga Seluruhnya	59.114,00	59.114,00	

2. Sasaran Strategis (SS.3) : “ meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum “, melalui indikator kinerja : “ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum “ dengan realisasi sebesar 32,02 % bila dibandingkan dengan tahun lalu (2018) 30,31 % maka mengalami kenaikan sebesar 1,71 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Tercapainya indikator sasaran : “ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum “ dengan kategori **sangat memuaskan** dikarenakan didukung dari 1 (satu) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, sampai dengan tahun 2019 jumlah rumah tangga berakses air minum sebanyak 18.928,00 rumah tangga dengan beberapa sumber diantaranya APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran : “ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum “ dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SS.3)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100 %	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	100,69	97,25	3,44

5 Untuk mencapai sasaran strategis (SS.3) : “ Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Air Minum “ sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jaringan Air Minum dan Air Limbah dan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Minum dengan keluaran (output) tersedianya dokumen perencanaan teknis sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau mencapai 100,00 %, dengan realisasi anggaran Rp. 266.561.000,00 atau 99,81 % dari anggaran Rp. 267.050.000,00
- 2) Pembangunan Jaringan Air Minum DAK, dengan keluaran (output) Jaringan Air Minum yang dibangun sepanjang 294,98 M’ atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 2.502.350.000,00 atau 96,99 % dari anggaran Rp. 2.579.962.146,90

Evaluasi Sasaran Strategis (SS.4) : “ Meningkatkan Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “

Tabel 3.11.
Aanalisis Kinerja Sasaran Strategis 4. (SS.4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	38,87	39,06	39,06	100,00	43,85

Dari tabel di atas dapat dilihat :

“ Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “

1. Sasaran Strategis (SS.4) : “ Meningkatkan Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “, melalui indikator kinerja : “ Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “ dengan realisasi 39,06 %. Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian kinerja 100,00 %.

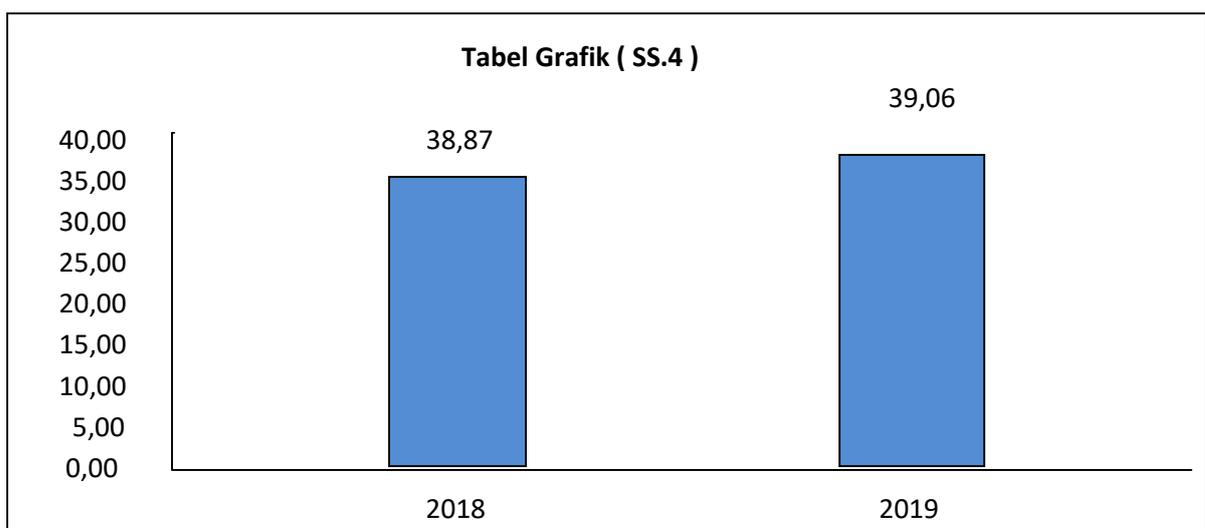
Indikator sasaran kinerja (SS. 4) : “ Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “ ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis (SS. 4)	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	=	$\frac{\text{Luas Saluran Irigasi}}{\text{Luas Lahan Budi Daya Pertanian}}$	X	100,00 %
---------------------------------------	--	---	---	---	----------

Tabel 3.12. Pengukuran Indikator Sasaran Strategis (SS.4)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (M2)	Realisasi (M2)	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	Luas Jaringan Irigasi	30.395,71	30.395,71	39,06
	Luas Lahan Budidaya Pertanian	77.818,00	77.818,00	

2. Sasaran Strategis (SS.4) : “ Meningkatkan Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “, melalui indikator kinerja : “ Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “ dengan realisasai sebesar 39,06 % bila dibandingkan dengan tahun lalu (2018) maka mengalami kenaikan sebesar 0,19 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Terciptanya Indikator Sasaran : “ Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya

Pertanian “, dengan kategori **sangat memuaskan** dikarenakan didukung dari 1 (satu) Program, yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dan 8 (delapan) kegiatan, yang dibiayai dari beberapa sumber diantaranya APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran : “ Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian “ dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SS.4)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	100,00	98,69	1,31

- 5 Untuk mencapai sasaran strategis (SS.4) : “ Meningkatkan Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian “ didukung oleh satu program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi dengan keluaran (output) tersedianya dokumen perencanaan teknis sebanyak 6 (enam) dokumen atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 489.089.000,00 atau 88,97 % dari anggaran Rp. 549.689.436,00
- 2) Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi dengan keluaran (output) tersedianya dokumen pengawasan teknis sebanyak 6 (enam) dokumen atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 178.497.000,00 atau 99,54 % dari anggaran Rp. 179.323.140,00
- 3) Pembangunan Jaringan Irigasi DAK, dengan keluaran (output) Jaringan Irigasi yang dibangun seluas 632,00 M' atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 2.502.350.000,00 atau 96,99 % dari anggaran Rp. 2.579.962.146,90

Evaluasi Sasaran Strategis (SS.5) : “ Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi “

Tabel 3.14.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS.5)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	27,44	29,21	28,88	98,87	37,04

Dari tabel di atas dapat dilihat :

“ Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “

1. Sasaran Strategis (SS.5) : “ Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi “, melalui indikator kinerja “ Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “ dengan realisasi 28,88 % dari target 29,21 % sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja . Capaian indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 98,87 %

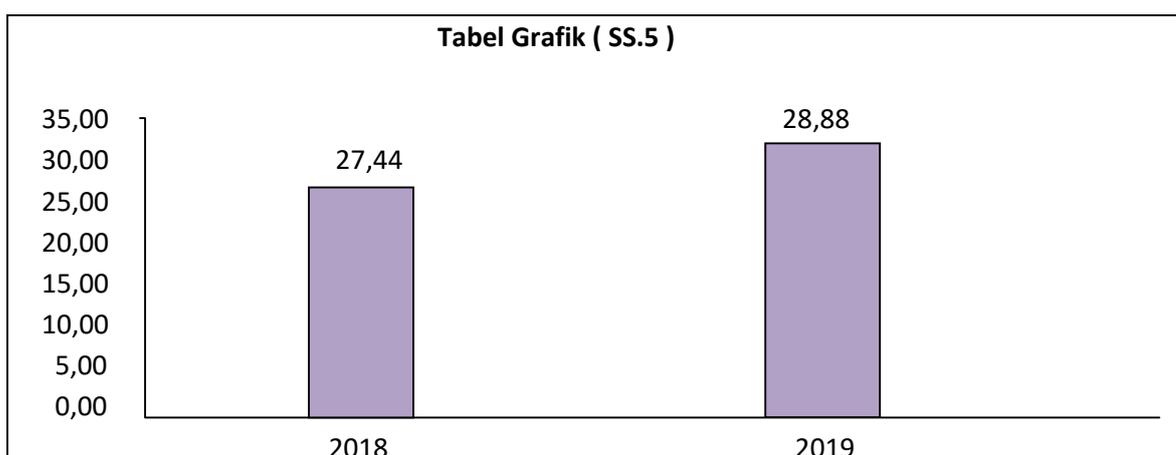
Indikator sasaran kinerja (SS.5) : Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “ ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indikator 3 (SS.3)} : \text{Persentase Rumah Tangga Bersanitasi} = \frac{\Sigma \text{ Rumah Tangga Bersanitasi}}{\Sigma \text{ Seluruh Rumah Tangga}} \times 100,00 \%$$

Tabel 3.15. Pengukuran Indikator Sasaran Strategis (SS.5)

Indikator Sasaran Strategis	Varibale Pengukuran	Target (RT)	Relisasi (RT)	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	Σ Rumah Tangga Bersanitasi	17.267,00	17.072,00	28,88
	Σ Seluruh Rumah Tangga	59.114,00	59.114,00	

2. Sasaran Strategis (SS.5) : “ Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi “ , melalui indikator kinerja : “ Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “ dengan realisasi sebesar 28,88 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) 27,44 % maka mengalami kenaikan sebesar 1,44 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Tercapaian indikator sasaran : “ Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “ dengan kategori **sangat memuaskan** dikarenakan didukung dari 1 (satu) program dan 12 (dua belas) kegiatan, sampai dengan tahun 2019 jumlah rumah tangga bersanitasi sebesar 17.072 dengan beberapa sumber dana diantaranya APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus .
4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran : “ Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “ dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.16.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SS.5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≤ 100 %	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	98,87	83,05	15,82

5. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.5) : “ Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi “ melalui indikator kinerja : “ Persentase Rumah Tangga Bersanitasi “ sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jaringan Air Minum dan Air Limbah dan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan Teknis Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK dengan keluaran (output) tersedianya dokumen perencanaan teknis sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau mencapai 100,00 %, dengan realisasi anggaran Rp. 85.900.000,00 atau 99,91 % dari anggaran Rp. 85.974.945,00.
 - 2) Pengawasan Teknis Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK dengan keluaran (output) tersedianya dokumen pengawasan teknis sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau mencapai 100,00 %, dengan realisasi anggaran Rp. 113.000.000,00 atau 98,57 % dari anggaran Rp. 114.633.250,00.
 - 3) Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK (DAK), dengan keluaran (output) IPAL Komunal Kombinasi MCK yang dibangun seluas 136 M2 atau mencapai 100,00 % dengan realisasi anggaran Rp. 6.914.256.800,00 atau 82,67 % dari anggaran Rp. 8.363.636.660,00

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

B.1. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran dan realisasi APBD Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	PENDAPATAN DAERAH	1.400.000.000,00	1.356.097.625,00	96,86
II.	BELANJA DAERAH	67.783.069.378,00	66.419.051.849,00	97,99
III.	BELANJA LANGSUNG	10.696.555.507,12	10.502.596.849,00	98,19
IV.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.086.513.870,88	55.916.455.000,00	97,95

B.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Target Pendapatan Asli Daerah sebelum Perubahan APBD adalah sebesar Rp. 800.000.000,00 pada bulan September 2019 diusulkan revisi target pendapatan menjadi Rp. 1.400.000.000,00, hal ini mengingat pada Bulan Agustus 2019 realisasi pendapatan telah mencapai Rp. 1.150.000.000,00.

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.356.097.625,00 atau 96,86 % dari target Rp. 1.400.000.000,00

B.3 Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 sebesar Rp. 67.783.069.378,00, terealisasi sebesar Rp. 66.419.051.849,00 atau 97,99 %, penyerapan anggaran sudah maksimal walaupun belum 100,00 % hal ini disebabkan karena adanya selisih tender yang tidak dapat diserap. Adapun realisasi kinerja anggaran yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18.
Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas PUPR Tahun 2019

No	Sasaran Daerah (RPJMD)	Sasaran Strategis (Renstra)	Indikator Kinerja	Kinerja			Program / Kegiatan	Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Capaian Administrasi Perkantoran	100,00	85,76	85,76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.383.800,00	840.785.229,00	95,29	
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	208.486.800,00	208.486.800,00	100,00
							2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	36.400.000,00	11.867.500,00	32,60
							3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.337.000,00	48.337.000,00	100,00
							4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.860.000,00	21.800.000,00	99,73
							5	Penyediaan Makan dan Minum	72.000.000,00	71.390.000,00	99,15
							6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450.000.000,00	447.453.929,00	99,43
							7	Sosialisasi/Survey Lapangan/Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	45.300.000,00	31.450.000,00	69,43
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.998.389.150,00	1.984.000.000,00	99,28	
							1	Pengadaan Perengkapan Kantor	18.876.000,00	18.500.000,00	98,01
							2	Pengadaan Peralatan Kantor	143.113.150,00	140.700.000,00	98,31
							3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	36.400.000,00	36.400.000,00	100,00
							4	Pembangunan Pos Keamanan	1.515.400.000,00	1.515.400.000,00	100,00
							5	Perencanaan Teknis Pos Keamanan	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00
							6	Pengawasan Teknis Pos Keamanan	116.600.000,00	105.000.000,00	90,05
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.820.000,00	20.722.000,00	99,53	
							1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja SKPD	10.544.000,00	10.511.000,00	99,69
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.276.000,00	10.211.000,00	99,37							
2	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan Keparawisataan sesuai dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisai Baik	71,50	71,60	100,13	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	33.335.299.000,00	32.319.900.500,00	96,95	
							1	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2018	734.061.000,00	730.000.000,00	99,45
							2	Peningkatan Jalan Bhayangkara	7.700.000.000,00	7.440.577.000,00	96,63
							3	Peningkatan Jalan Kompleks Bengkel	2.000.000.000,00	1.996.000.000,00	99,80
							4	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.370.000,00	65.370.000,00	100,00
							5	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	183.250.000,00	183.250.000,00	100,00
							6	Peningkatan Jalan Hom Hom - Muay	4.900.000.000,00	4.755.400.000,00	97,05
							7	Perencanaan Teknis Jalan 4 Kegiatan	225.530.000,00	225.000.000,00	99,76
							8	Pengawasan Teknis Jalan 4 Kegiatan	310.912.000,00	309.925.000,00	99,68
							9	Peningkatan Jalan Maima - Soba	1.400.000.000,00	1.200.000.000,00	85,71
							10	Peningkatan Jalan Hitigima KP. Harapan	816.176.000,00	814.000.000,00	99,73
							11	Pembangunan Jembatan Sungai Huam	7.125.000.000,00	7.000.000.000,00	98,25
							12	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Huam dan Jembatan Sungai Palukep	446.747.500,00	445.632.000,00	99,75
							13	Pembangunan Jembatan Sungai Palukep	7.125.000.000,00	6.851.494.000,00	96,16
							14	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.370.000,00	65.370.000,00	100,00
							15	Perjalanan Dinas Petugas E.Mon.DAK	43.282.500,00	43.282.500,00	100,00
		16	Perjalanan Dinas ke Lokasi	194.600.000,00	194.600.000,00	100,00					
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.000.380.000,00	2.995.805.000,00	99,85						
		1	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	2.792.760.000,00	2.790.000.000,00	99,90					
		2	Perencanaan Teknis Jalan Dalam Kota	72.080.000,00	70.265.000,00	97,48					
		3	Pengawasan Teknis Jalan Dalam Kota	135.540.000,00	135.540.000,00	100,00					
		Program Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	34.630.000,00	34.630.000,00	100,00						
		1	Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten	34.630.000,00	34.630.000,00	100,00					
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jaringan Air Minum dan Air Limbah	2.988.728.007,92	2.911.126.862,12	97,40								
1	Pembangunan Jaringan Air Minum Kurulu	349.124.999,04	348.000.000,00	99,68							
2	Pembangunan Jaringan Air Minum Hubikosi	349.124.999,04	348.000.000,00	99,68							
3	Pembangunan Jaringan Air Minum Libarek	349.124.999,04	348.000.000,00	99,68							
4	Pembangunan Jaringan Air Minum Siepkosi	349.124.999,04	348.000.000,00	99,68							
5	Pembangunan Jaringan Air Minum Yalengga	299.250.000,00	228.000.000,00	76,19							
6	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00							
1	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	31,80	32,02	100,69						

No	Sasaran Daerah (RPJMD)	Sasaran Strategis (Renstra)	Indikator Kinerja	Kinerja			Program / Kegiatan	Keuangan		
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							7 Perjalanan Dinas Petugas E.Mon.DAK	7.365.852,12	7.365.852,12	100,00
							8 Perjalanan Dalam Daerah	112.150.000,00	112.150.000,00	100,00
							9 Pembangunan Jaringan Air Minum Bugi	555.356.503,80	554.500.000,00	99,85
							10 Pembangunan Jaringan Air Minum Wamena Kota	441.494.646,84	440.500.000,00	99,77
							11 Perencanaan Teknis Jaringan Air Minum	154.411.000,00	154.411.000,00	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	39,06	39,06	100,00	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.265.468.000,00	12.218.550.782,00	99,62
							1 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air Tulem	1.517.499.670,00	1.515.000.000,00	99,84
							2 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air Muay	1.649.999.250,00	1.645.570.000,00	99,73
							3 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air Pugima	975.000.000,00	973.300.000,00	99,83
							4 Perencanaan Teknis DAK Irigasi DAK	179.323.140,00	178.497.000,00	99,54
							5 Pengawasan Teknis DAK Irigasi DAK	239.097.436,00	237.000.000,00	99,12
							6 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.300.000,00	54.300.000,00	100,00
							7 Perjalanan Dinas Petugas E.Mon.DAK	14.547.782,00	14.547.782,00	100,00
							8 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.475.000,00	110.475.000,00	100,00
							9 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air Elabukama	3.781.383.472,00	3.773.000.000,00	99,78
							10 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air Megapura	3.433.250.250,00	3.406.269.000,00	99,21
							11 Perencanaan DAK Irigasi Tahun 2018	310.592.000,00	310.592.000,00	100,00
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Masyarakat	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	29,21	28,88	98,87	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jaringan Air Minum dan Air Limbah	7.802.827.020,00	7.776.738.965,00	99,75
							1 Pembangunan MCK Piramid	807.975.000,00	805.000.000,00	99,63
							2 Pembangunan MCK Bolakme	817.950.000,00	815.000.000,00	99,64
							3 Pembangunan MCK Wolo	826.654.860,00	823.000.000,00	99,56
							4 Perencanaan Teknis Sanitasi	85.974.945,00	85.900.000,00	99,91
							5 Pengawasan Teknis Sanitasi	114.633.250,00	113.000.000,00	98,58
							6 Perjalanan Dinas Petugas E.Mon.DAK	6.099.945,00	6.099.945,00	100,00
							7 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.875.000,00	79.875.000,00	100,00
							8 Pembangunan MCK Silokarno Doga	598.500.000,00	598.000.000,00	99,92
							9 Pembangunan MCK Asolokobal	598.500.000,00	596.400.000,00	99,65
							10 Pembangunan MCK Hubikiak	997.500.000,00	991.100.000,00	99,36
							11 Pembangunan MCK Napua	798.000.000,00	792.200.000,00	99,27
							12 Pembangunan MCK Wamena	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00
							13 Pembangunan MCK Wouma	543.556.800,00	543.556.800,00	100,00
							14 Pembangunan MCK Putagaima	475.000.000,00	475.000.000,00	100,00
							15 Honorarium Petugas E. Mon DAK	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
							16 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
							17 Perjalanan Ke Lokasi Kegiatan	33.607.780,00	33.607.780,00	100,00
							18 Rapat Koordinasi Penguatan TFL,KSN,KPP	27.999.440,00	27.999.440,00	100,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian sasaran strategis 1 (SS.1) dikategorikan Memuaskan, sasaran strategis, 2 (SS. 2), sasaran stratgeis 3 (SS.3), sasaran strategis 4 (SS.4), dan sasaran strategis 5 (SS.5) dikategorikan Sangat Memuaskan.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

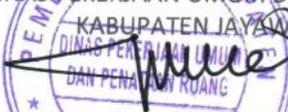
Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan secara komprehensif. Laporan kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2019. Pencapaian terhadap sasaran strategis yang dapat melebihi target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas PUPR 2018-2023 telah dapat menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya telah memperhatikan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya, dengan capaian akhir kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023.

Untuk meningkatkan dan perbaikan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dinas PUPR telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

- Pelatihan e-SAKIP;
- Review Renstra Dinas PUPR;
- Review Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Penggunaan Sistem Pelaporan Kinerja secara Elektronik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance, juga hasil kerja Dinas PUPR berupa pembangunan infrastruktur dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam rangka pembangunan yang berkeadilan.

Wamena, 20 Januari 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAWIJA

MARCUS ADOLF HATTU, ST
NIP. 19600814 198103 1 008